

BAB V KESIMPULAN

Majalah Forum Keadilan merupakan salah satu media yang lahir di tengah dinamika guncangan pers Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Berdiri pada tahun 1988, majalah ini hadir dalam kondisi politik yang “menekan”, ketika kebebasan pers berada di bawah kontrol ketat pemerintah melalui mekanisme seperti SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Pada masa awal Orde Baru, bahkan sebelum kelahirannya, ruang gerak pers sangat terbatas karena media diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional. Kritik terhadap negara, militer, maupun kebijakan pemerintah hampir tidak memperoleh ruang.

Sehingga media seperti Forum Keadilan pada dasarnya belum memiliki tempat untuk berkembang lebih bagaimana seharusnya media beroperasi. Dalam konteks tersebut, lahirnya Forum Keadilan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan Orde Baru yang menjadikan media sebagai alat legitimasi politik. Namun, berbeda dengan banyak media lain yang cenderung mengikuti arus utama, Forum Keadilan menempuh jalannya sendiri dengan membawa misi jurnalistik yang berorientasi pada penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran. Keberadaannya menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap hegemoni wacana negara, meskipun harus bergerak dalam ruang yang sempit dan penuh tekanan.

Pada masa Orde Baru, praktik pembredelan terhadap media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah menciptakan budaya pers yang berhati-hati.

Dalam situasi ini, Forum Keadilan mengembangkan strategi bertahan dengan menggunakan gaya bahasa yang argumentatif, logis, dan tidak emosional. Melalui pendekatan analitis dan berbasis hukum, majalah ini mampu menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan secara langsung dengan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun berada dalam tekanan politik, Forum Keadilan tetap hadir sebagai ruang alternatif bagi wacana hukum dan demokrasi.

Strategi ini membuatnya mampu bertahan di tengah tekanan politik tanpa kehilangan substansi kritis. Dalam liputan-liputannya, majalah ini tidak hanya sekadar menyajikan fakta, tetapi juga menawarkan perspektif hukum dan demokrasi yang menempatkan pemerintah sebagai subjek yang juga harus tunduk pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu frontal, Forum Keadilan menjadi salah satu ruang alternatif yang menyalurkan wacana reformasi hukum dan demokrasi sebelum Soeharto turun dari kekuasaan.

Memasuki tahun 1998, ketika krisis mengguncang Indonesia dan rezim Orde Baru runtuh, terjadi perubahan besar dalam lanskap pers nasional. Reformasi membuka ruang kebebasan pers yang jauh lebih luas, dan dalam konteks ini Forum Keadilan tampil sebagai media yang aktif dan kritis dalam mengawal perubahan politik. Tahun 1998 menjadi titik penting dalam sejarah majalah ini karena menandai transformasi dari media yang sebelumnya bersuara dalam keterbatasan menjadi media yang lebih terbuka dan berani menyuarakan tuntutan reformasi.

Masa awal reformasi, Forum Keadilan secara konsisten mengangkat isu-isu strategis seperti Dwifungsi ABRI, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, serta tuntutan otonomi daerah. Intensitas pemberitaan yang tinggi dan keberanian dalam menyuarakan kritik menunjukkan bahwa majalah ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor dalam proses demokrasi. Secara struktural, perubahan dalam susunan redaksi pada tahun 1999 juga mencerminkan adanya penyesuaian organisasi dalam menghadapi dinamika politik yang baru.

Secara struktural, pada masa Reformasi juga terjadi perubahan dalam tubuh redaksi Forum Keadilan. Pergantian susunan redaksi, seperti yang terlihat pada tahun 1999, mencerminkan adanya penyesuaian organisasi dalam menghadapi dinamika politik yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berubah dari segi isi, tetapi juga dari sisi manajemen dan arah kebijakan editorial. Dari segi narasi, Forum Keadilan secara konsisten membangun framing yang mendukung demokrasi, supremasi sipil, dan penegakan HAM. Majalah ini memosisikan diri sebagai media yang berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam mengkritisi warisan Orde Baru.

Dari segi narasi, Forum Keadilan membangun framing yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan penegakan HAM. Narasi yang dikembangkan tidak hanya berisi tuntutan keadilan, tetapi juga refleksi terhadap pentingnya pembentukan sistem hukum yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Majalah ini tidak sekadar memberitakan peristiwa, melainkan juga

berperan dalam mempengaruhi pandangan publik untuk memahami makna reformasi dalam kerangka hukum dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, perjalanan Forum Keadilan mencerminkan dinamika hubungan antara pers dan kekuasaan dalam sejarah Indonesia. Dari masa Orde Baru yang represif hingga reformasi yang lebih terbuka, majalah ini menunjukkan pergeseran dari sikap hati-hati menuju keberanian dalam mengkritisi kekuasaan. Narasi yang dibangunnya tidak hanya merekam peristiwa, tetapi juga mengonstruksi makna tentang hukum, keadilan, dan demokrasi sebagai bagian dari perjuangan bangsa.

Dengan demikian, Forum Keadilan memiliki posisi penting dalam sejarah pers Indonesia. Ia bukan sekadar media hukum, melainkan instrumen intelektual yang berperan dalam membentuk opini publik, mengkritisi kekuasaan, dan mengawal proses transformasi demokrasi. Perannya pada tahun 1998 membuktikan bahwa media memiliki kekuatan besar sebagai pengawas kekuasaan, penyalur aspirasi rakyat, dan penjaga moral hukum. Oleh karena itu, Forum Keadilan layak dipandang tidak hanya sebagai produk jurnalistik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan intelektual dalam perjalanan reformasi Indonesia.